



CALL FOR PAPER

Conference on Economic and Business Innovation
Sekretariat: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widyagama Malang
Jalan Borobudur No. 35, Malang, Jawa Timur, 65142
Email: febiuwg@gmail.com



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK
FORUM DOSEN AKUNTANSI PUBLIK

Pengendalian Internal, Kompetensi Auditor dan Pencegahan Fraud Pemerintah Daerah

Meldi Andika Putra¹, Dr. Sri Rahayu, S.E., MSA., Ak², Reni Yustien, SE,
M.Si, Ak, CA³

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi, email: meldya.p5597@gmail.com

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi, email: sri_rahayu@unja.ac.id

³Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi, email: reni.yustien@unja.ac.id

Abstract

The purpose of this research is to determine the effect of internal control and apparatus competition on fraud prevention in local governments. The research was conducted in one of the regional apparatus organizations, namely The Education and Culture Office of Tebo Regency, Jambi Province. The research respondents were 42 structural and functional officials. The number of questionnaires that were returned and could be processed was 39. Data analysis used multiple regression. Research results show that internal control and the competence of state civil servants affect the prevention of fraud. This means that internal control and the competence of the State civil apparatus can increase efforts to prevent fraud. Local governments should continue to improve the implementation of internal control systems in all. Employees must understand and be able to implement it in their daily activities. The competence of employees can be improved through further education, training, technical guidance and outreach. In addition, it is necessary to note the background and experience of employees in position placement and assignment.

Keywords: Internal Control, apparatus competence, fraud prevention

Pengendalian Internal, Kompetensi Auditor dan Pencegahan Fraud Pemerintah Daerah

PENDAHULUAN

Praktek korupsi banyak dijumpai di negara-negara berkembang termasuk Indonesia, karena secara umum di negara-negara tersebut hukum belum ditegakkan secara baik. Ini dapat dilihat pada Indeks Persepsi Korupsi, Indonesia termasuk negara dengan peringkat korupsi tertinggi di dunia dengan skor 40 dengan Indeks Persepsi Korupsi mulai diperingkat dari angka 0 – 100, nilai 100 adalah tingkat korupsi paling rendah (KPK,2019). Bila seluruh Negara diukur, Indonesia berada pada posisi 85 dari 180 negara. Skor 40 menunjukkan bahwa Indonesia masih belum dapat keluar dari situasi korupsi. Korupsi yang terjadi di Indonesia tidak hanya terjadi pada pemerintah pusat, tapi juga telah terjadi terhadap pemerintah daerah. Ini terjadi karena keuangan daerah tidak luput dari imbas sistem reformasi yang terjadi di Indonesia. Adanya reformasi dalam pengelolaan sistem keuangan negara melalui otonomi daerah turut menggeser ruang korupsi ke level daerah. (KPK, 2019).

Fenomena Fraud di Kabupaten Tebo terjadi pada tahun 2015 yang melibatkan salah satu Mantan Pejabat di salah satu OPD (Tribun Jambi, 2016). Pada tahun 2017 juga ditemukan fraud terkait pengadaan di salah satu OPD lainnya (Tribun Jambi, 2019). Bahkan Tahun 2018 kembali terjadi kasus fraud di pengelolaan keuangan dana di Kabupaten Tebo (Tribun Jambi,2018). Dilihat dari beberapa kasus diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pencegahan kecurangan diperlukan dalam pengelolaan dana pada Dinas Kabupaten Tebo.

Beberapa factor yang diduga mempengaruhi variabel Pencegahan Fraud adalah Pengendalian Internal dan Kompetensi Aparatur, Kegiatan pengendalian adalah bagian dari unsur Pengendalian Intern yang wajib diterapkan dalam intansi pemerintah. Kegiatan Pengendalian menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah “tindakan yang diperlukan untuk mengatasi resiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur, untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi resiko telah dilaksanakan secara efektif”.

Beberapa penelitian telah dilakukan mengenai pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan. Penelitian yang dilakukan oleh Korompis dkk. (2015) dan Sukadwilinda dan Ratnawati (2013) menemukan bahwa pengendalian internal berpengaruh negatif signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, Penelitian ini menemukan hasil bahwa pengendalian internal berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan, artinya sistem pengendalian yang efektif dapat meminimalisir terjadinya kecenderungan kecurangan.

Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Usman dkk (2015) dan Eldyanti dkk yang melakukan penelitian tentang pengaruh sistem pengendalian internal dalam kecenderungan kecurangan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Saputra dkk (2019) menemukan bahwa kompetensi aparatur memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud. Aparatur yang memiliki kompetensi yang baik dapat meningkatkan kinerjanya sesuai dengan SOP yang berlaku. Hasil penelitian tersebut telah sesuai dengan keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara

Pengendalian Internal, Kompetensi Auditor dan Pencegahan Fraud Pemerintah Daerah

Nomor 46A Tahun 2003, yang menetapkan bahwa kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang pegawai negeri sipil (PNS) berupa pengetahuan. Hasil keputusan tersebut juga didukung penelitian yang dilakukan Huslina dkk (2015) dan Widyarta dkk (2017) yang juga menemukan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh terhadap pencegahan fraud.

Peneliti mencoba memperbaiki penelitian sebelumnya dimana penelitian yang dilakukan oleh Sukadwilinda dan Ratnawati menggunakan variabel pengendalian internal pada penelitian ini menambahkan variabel kompetensi aparatur, tahun penelitian ini dilakukan pada tahun 2020 sedangkan sebelumnya pada tahun 2013.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui pengaruh pengendalian internal dan kompetensi aparatur sipil Negara terhadap pencegahan kecurangan (fraud) di kabupaten Tebo. (2) mengetahui pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan (fraud) di Kabupaten Tebo. (3) mengetahui pengaruh kompetensi aparatur sipil Negara terhadap pencegahan kecurangan (fraud) di kabupaten Tebo.

KAJIAN TEORI

Pencegahan Kecurangan (*Fraud*)

Pencegahan kecurangan adalah tindakan yang dapat dilakukan untuk menghindari orang untuk berbohong, menjiplak, dan mencuri, memeras, memanipulasi, kolusi dan menipu orang lain dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang/kelompok lain dengan cara melawan hukum. (Suradi, 2006) Mencegah kecurangan mencakup dua aktivitas utama, yaitu :

- a. Menciptakan dan memelihara budaya kejujuran, keterbukaan dan asistensi.
 1. Menuntut manajemen puncak untuk berperilaku sesuai dengan etika.
 2. Merekrut pegawai yang jujur dan berkualitas.
 3. Mengkomunikasikan ekspektasi organisasi dan melakukan konfirmasi tertulis secara periodik.
 4. Menciptakan lingkungan kerja yang positif.
 5. Mengembangkan dan memelihara kebijakan yang efektif untuk menghukum pelaku kecurangan.
- b. Menilai dan mengurangi resiko terjadinya kecurangan, Mengidentifikasi sumberresiko secara akurat dan mengukur resiko.
 1. Mengimplementasikan pengendalian yang bersifat preventif dan detektif.
 2. Menciptakan pemantauan yang diperluas oleh karyawan.
 3. Melaksanakan pengecekan secara independen, mencakup adanya suatu fungsi audit yang efektif.

Pengendalian Internal

Pengendalian intern menurut Wuryan Andayani (2008) dalam *Committee on Auditing Procedures, SAS (Statement on Auditing Standards) No. 1 (par 320-09) 1984-AICPA (American Institute of Certified Public Accountants)* menyatakan pengendalian internal adalah sebagai berikut:

Pengendalian Internal, Kompetensi Auditor dan Pencegahan Fraud Pemerintah Daerah

“Internal control comprises the plan of organization and all of the coordinate methods and measures adopted within a business to safeguard its assets, check the accuracy and reliability of its accounting data, promote operational efficiency and encourage adherence to prescribed managerial policies”.

Berdasarkan definisi tersebut pengendalian internal diartikan bahwa pengendalian internal terdiri dari rencana organisasi semua koordinat mengadopsi metode dan keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi operasional dan mendorong ketaatan terhadap kebijakan manajerial yang ditentukan.

Kompetensi Aparatur Sipil Negara

Kompetensi aparatur juga menjadi hal yang perlu di pertimbangkan dalam sistem pencegahan *fraud*. Hasil penelitian dari Spencer dan Spencer (1993) kompetensi merupakan landasan dasar karakteristik seseorang dan mengindikasikan cara berperilaku, berpikir, menyamakan situasi, dan mendukung untuk periode waktu yang lama. Dengan kata lain kompetensi adalah sesuatu yang ditunjukkan seseorang dalam kerja setiap hari. Ketika aparatur sudah dibekali dengan kompetensi yang baik, maka diharapkan hal tersebut dapat berguna dalam pencegahan *fraud*.

Wibowo (2012) memberikan pengertian kompetensi adalah: “Kemampuan untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut”. Surya Dharma (2013) mengemukakan bahwa kompetensi adalah: “Apa yang dibawa oleh seseorang kedalam pekerjaannya dalam bentuk jenis dan tingkatan perilaku yang berbeda”. Kompetensi aparatur dapat dikatakan sebagai factor utama dalam pencegahan fraud yang akan terjadi, dengan adanya kompetensi aparatur yang memadai dalam pengelolaan instansi pemerintah. Maka, sangat diharapkan tujuan dari perusahaan dapat tercapai tanpa adanya kecurangan. Untuk membangun sistem pendukung kerja yang handal dibutuhkan aparatur berintegritas tinggi yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab, kompeten, cerdas, trampil dan memiliki keahlian khusus. Selain itu kompetensi aparatur juga menjadi hal yang perlu di pertimbangkan dalam sistem pencegahan *fraud*.

METODE PENELITIAN

Proses pengumpulan data mulai dilakukan pada tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan 29 Juni 2020 sebagai batas akhir pengembalian kuesioner. Dari 42 kuesioner yang disebarkan, ditemukan tingkat pengembalian (*response rate*) sebanyak 39 kuesioner atau 93 persen berhasil dikembalikan sedangkan sisa sebanyak 3 kuesioner atau 7 persen tidak dikembalikan dan sebanyak 2 kuesioner tidak dapat digunakan dikarenakan 2 kuesioner yang kembali tidak terisi sebagaimana mestinya.

Adapun pengambilan sampel pada penelitian ini dengan menggunakan *Purposive Sampling*. Sugiyono (2014) mengemukakan bahwa *Purposive Sampling* adalah sebagai berikut: “*Sampling Purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.”

Pengendalian Internal, Kompetensi Auditor dan Pencegahan Fraud Pemerintah Daerah

Adapun sampel dalam penelitian ini adalah pegawai yang masuk dalam struktur organisasi dan menempati jabatan fungsional yaitu Kepala Dinas, sekretaris Dinas, Kepala Subbagian dan anggota subbagian yang bersifat Aparatur Sipil Negara.

Teknik analisis data yang dilakukan pada riset ini yakni uji instrument yaitu uji validitas dan reliabilitas, uji deskriptif statistik menggunakan tes koefisien determinasi, uji T dan uji F. Kuesioner akan diukur dengan menggunakan skala Likert dengan skor tertinggi di tiap pertanyaannya adalah 4 dan skor terendah adalah 1.

Teknik analisis data menggunakan persamaan regresi linear berganda untuk menguji pengaruh tiap-tiap variabel independen terhadap variabel terikat menggunakan alat analisis statistik SPSS Versi 22.

Adapun persamaannya sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan :

Y	= Efektivitas pencegahan fraud
α	= Konstanta
β_1, β_2	= Koefisien regresi
X1	= Pengendalian internal
X2	= Kompetensi aparatur
e	= error

METODE PENELITIAN

Proses pengumpulan data mulai dilakukan pada tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan 29 Juni 2020 sebagai batas akhir pengembalian kuesioner. Dari 42 kuesioner yang disebarkan, ditemukan tingkat pengembalian (*response rate*) sebanyak 39 kuesioner atau 93 persen berhasil dikembalikan sedangkan sisa sebanyak 3 kuesioner atau 7 persen tidak dikembalikan dan sebanyak 2 kuesioner tidak dapat digunakan dikarenakan 2 kuesioner yang kembali tidak terisi sebagaimana mestinya.

Adapun pengambilan sampel pada penelitian ini dengan menggunakan *Purposive Sampling*. Sugiyono (2014) mengemukakan bahwa *Purposive Sampling* adalah sebagai berikut: “*Sampling Purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.”

Adapun sampel dalam penelitian ini adalah pegawai yang masuk dalam struktur organisasi dan menempati jabatan fungsional yaitu Kepala Dinas, sekretaris Dinas, Kepala Subbagian dan anggota subbagian yang bersifat Aparatur Sipil Negara.

Teknik analisis data yang dilakukan pada riset ini yakni uji instrument yaitu uji validitas dan reliabilitas, uji deskriptif statistik menggunakan tes koefisien determinasi, uji T dan uji F. Kuesioner akan diukur dengan menggunakan skala Likert dengan skor tertinggi di tiap pertanyaannya adalah 4 dan skor terendah adalah 1.

Pengendalian Internal, Kompetensi Auditor dan Pencegahan Fraud Pemerintah Daerah

Teknik analisis data menggunakan persamaan regresi linear berganda untuk menguji pengaruh tiap-tiap variabel independen terhadap variabel terikat menggunakan alat analisis statistik SPSS Versi 22.

Adapun persamaannya sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan :

Y	= Efektivitas pencegahan fraud
α	= Konstanta
β_1, β_2	= Koefisien regresi
X1	= Pengendalian internal
X2	= Kompetensi aparatur
e	= error

Definisi Operasionalisasi dan Pengukuran Variabel

Variabel merupakan suatu sifat yang dapat memiliki berbagai macam nilai (Indriantoro dan Supomo, 2014). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua yakni variabel yakni variabel independen dan variabel dependen.

Variabel Independen (*Independent Variable*)

Variabel Independen (*Independent Variable*) disebut juga dengan variabel bebas merupakan jenis variabel yang dipandang sebagai penyebab munculnya variabel dependen yang diduga sebagai akibatnya (Indriantoro dan Supomo, 2014). Variabel independen dalam penelitian ini adalah integritas aparatur, penggunaan teknologi informasi dan pengendalian internal.

Pengendalian Internal (X₁)

Sistem pengendalian internal adalah suatu cara mengawasi, mengarahkan serta mengukur sumber daya suatu lembaga dan memiliki peran yang penting di dalam pencegahan dan pendeteksian adanya tindakan kecurangan. (Eldayanti dkk, 2020) Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel pengendalian internal dalam penelitian ini diadopsi dari penelitian Lestari dan Baihaqi (2014) melalui 13 butir pernyataan dengan skala likert 4 poin. Mengisi kuesioner, responden diminta untuk menilai pemanfaatan teknologi informasi dengan memilih skala 1 (tidak pernah) sampai dengan 4 (selalu). Adapun indikator yang digunakan ialah :

1. Lingkungan pengendalian
2. Penilaian resiko
3. Kegiatan pengendalian
4. Informasi dan komunikasi
5. Pemantauan pengendalian internal

Kompetensi Aparatur Sipil Negara (X₂)

keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46A Tahun 2003, yang menetapkan bahwa kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang pegawai negeri sipil (PNS) berupa pengetahuan, keterampilan,

Pengendalian Internal, Kompetensi Auditor dan Pencegahan Fraud Pemerintah Daerah

sikap, dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga PNS tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien.

Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel kompetensi aparatur dalam penelitian ini diadopsi dari penelitian Huslina (2015) melalui 11 butir pernyataan dengan skala likert 4 poin. Untuk mengisi kuesioner, responden diminta untuk menilai kompetensi aparatur sipil negara dengan memilih skala 1 (tidak pernah) sampai dengan 4 (selalu). Adapun indikator yang digunakan ialah :

1. Kejujuran pegawai
2. Tanggung jawab pegawai pasca pelatihan
3. Pengalaman kerja

Teknik Skala Pengukuran

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah suatu pengukuran dari pengaruh pengendalian internal dan kompetensi aparatur terhadap efektifitas pencegahan fraud dengan menggunakan kuisisioner. Penelitian ini menggunakan skala pengukuran yang berbentuk *semantic differential*, data yang diperoleh adalah data interval dengan skor 1 s/d 4 poin (Sugiyono, 2011). Skala yang berisi empat tingkat prefensi jawaban dengan pemilihan sebagai berikut :

- a. Skor 1 untuk jawaban tidak pernah (TP)
- b. Skor 2 untuk jawaban jarang (JR)
- c. Skor 3 untuk jawaban sering (SR)
- d. Skor 4 untuk jawaban selalu (SL)

Variabel Dependen (*Dependent Variable*)

Indriantoro dan Supomo (2014) variabel dependen (*dependent variable*) atau variabel terikat dapat dinyatakan sebagai jenis variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi variabel independen, dalam penelitian ini adalah Pencegahan Fraud. Pencegahan didefinisikan sebagai upaya atau suatu proses untuk menahan atau menolak suatu hal suatu kejadian agar tidak terjadi (kamus besar Bahasa Indonesia,2015).

Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel efektivitas pencegahan fraud dalam penelitian ini diadopsi dari penelitian Huslina (2015) melalui 18 butir pernyataan dengan skala likert 4 poin. Untuk mengisi kuesioner, responden diminta untuk menilai pencegahan fraud dengan memilih skala 1 (tidak pernah) sampai dengan 4 (selalu). Adapun indikator yang digunakan ialah :

1. Ciptakan kejujuran, keterbukaan dan saling membantu
2. Proses rekrutmen yang jujur
3. Fraud awareness
4. Lingkungan kerja yang positif
5. Kode etik yang jelas, mudah dimengerti dan ditaati

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian dari pembagian kuesioner kepada 42 orang responden yang berasal dari aparatur yang ada di dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Tebo.

Pengendalian Internal, Kompetensi Auditor dan Pencegahan Fraud Pemerintah Daerah

Karakteristik Demografi Responden

Karakteristik merupakan ciri atau karakter yang secara alamiah melekat pada diri seseorang yang meliputi jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan dan masa kerja Pegawai Negeri Sipil pada semua jenjang kepegawaian dalam menyelenggarakan administrasi umum pemerintahan daerah. Berdasarkan hasil tabulasi data yang tersaji melalui Tabel 4.2 di bawah, terdapat beberapa informasi umum tentang keragaman karakteristik responden diantaranya sebagai berikut.

Tabel 4.2
Karakteristik Responden

Keterangan	Jumlah (orang)	Persentase
JenisKelamin		
1. Laki-laki	20	54%
2. Perempuan	17	46%
Tingkat Pendidikan		
1. S3	-	0%
2. S2	6	16%
3. S1	25	68%
4. D3	6	16%
Masa Kerja		
1. Tahun	37	100%
2. Bulan	-	0%

Sumber: Data Diolah, 2020

Dari Tabel 4.2 tersebut, diketahui bahwa responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 20 orang (54 persen), sedangkan responden berjenis kelamin perempuan sebanyak 17 orang (46 persen). Secara umum dapat dikemukakan bahwa penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi umum pemerintah di Dinas Pendidikan dan kebudayaan kabupaten tebo didominasi oleh Pegawai Negeri Sipil berjenis kelamin Laki-laki.

Uji Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan dalam menguji penelitian ini, dimaksudkan untuk melihat pengaruh variabel independen (pengendalian internal dan kompetensi aparatur) terhadap variabel dependen (Pencegahan Fraud). Hasil pengujian regresi linear berganda terdapat di Tabel 1. Dari Tabel 1 nilai konstanta bernilai positif yaitu sebesar 29,932. Hal ini berarti apabila pengendalian internal dan kompetensi aparatur sipil negara diasumsikan sama dengan 0 maka pencegahan kecurangan secara konstanta bernilai sebesar 29,932. Nilai konstanta bernilai positif yaitu sebesar 29,932. Hal ini berarti apabila pengendalian internal dan kompetensi aparatur sipil negara diasumsikan sama dengan 0 maka pencegahan kecurangan secara konstanta bernilai sebesar 29,932 dengan persamaan.:

$$Y = 29.932 + 0,851X1 - 0,344X2 + e$$

Pengendalian Internal, Kompetensi Auditor dan Pencegahan Fraud Pemerintah Daerah

Tabel 1. Hasil Uji Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	29.932	9.252		3.235	.003
Pengendalian internal	.851	.194	.584	4.384	.000
Kompetensi Aparatur	-.344	.168	-.273	-2.048	.048

a. Dependent Variable: TOTAL_Pencegahan Kecurangan

Hasil koefisien regresi menyatakan bahwa variabel pengendalian internal (X1) memiliki koefisien regresi senilai 0,851 artinya bahwa setiap penambahan pengendalian internal sebesar 1 satuan akan meningkatkan Pencegahan Fraud di kantor dinas pendidikan dan kebudayaan dikabupaten tebo sebesar 0,851. Pada variabel kompetensi aparatur sipil negara (X2) mempunyai koefisien regresi sebesar -0,344, yang artinya bahwa penambahan setiap 1 satuan kompetensi aparatur sipil negara maka akan menurunkan Pencegahan Fraud di kantor dinas pendidikan dan kebudayaan dikabupaten tebo sebesar -0,344.

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 2. Hasil Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.631 ^a	.398	.363	3.765

a. Predictors: (Constant), KASN, PI

b. Dependent Variable: PK

Berdasarkan tabel 2 memperlihatkan bahwa nilai *adjusted R Square* sebesar 0,363 yang mengandung arti bahwa 36,3% besarnya pencegahan kecurangan (*fraud*) dapat dijelaskan oleh variabel pengendalian internal, dan kompetensi aparatur sipil Negara sedangkan sisanya 63,7% lainnya dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

Hasil Uji f dan Uji t

Hasil Uji f ditunjukkan pada Tabel 3

Tabel 3. Hasil Uji F
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	319.138	2	159.569	11.257	.000 ^b
Residual	481.943	34	14.175		
Total	801.081	36			

a. Dependent Variable: PK

b. Predictors: (Constant), KASN, PI

Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai F_{hitung} sebesar 11.257 dengan angka signifikansi $0,000 < 0,05$ ($\alpha = 5\%$). Hal ini berarti variabel pengendalian internal, dan kompetensi aparatur berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*Fraud*).

Uji t dilakukan untuk menguji pengaruh variabel independen secara individual terhadap dependen. Hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Uji t

Pengendalian Internal, Kompetensi Auditor dan Pencegahan Fraud Pemerintah Daerah

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	29.932	9.252		3.235	.003
Pengendalian Internal	.851	.194	.584	4.384	.000
Kompetensi Aparatur	-.344	.168	-.273	-2.048	.048

a. Dependent Variable: PK

Dari data Tabel 4 dapat diketahui bahwa nilai sig. variabel pengendalian internal (X_1) $0,000 < 0,05$ ($\alpha = 5\%$). Hal ini berarti bahwa pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*Fraud*). Nilai sig. variabel kompetensi aparatur sipil negara (X_2) $0,048 < 0,05$ ($\alpha = 5\%$). Hal ini berarti bahwa kompetensi aparatur sipil negara berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*Fraud*).

Pengaruh Pengendalian Internal, Kompetensi Aparatur Sipil Negara Terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*)

Hasil pengujian pengaruh pengendalian internal, dan kompetensi aparatur sipil negara terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) menunjukkan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ ($\alpha = 5\%$). Hal ini berarti ada pengaruh yang signifikan antara pengendalian internal, kompetensi aparatur sipil negara terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*). Nilai *adjusted R Square* sebesar $0,363\%$ termasuk kategori pengaruh lemah ($20\% < KD < 40\%$).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kadek Widiyarta, Nyoman Trisna Herawati, dan Anantawikrama Tungga Atmadja (2017), Sintia N. Korompis, David P. E. Saerang, dan Jenny Morasa (2015), Sukadwilinda dan R. Aryanti Ratnawati (2013), mendukung penelitian ini dimana pengendalian internal, dan kompetensi aparatur sipil negara berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*). Semakin tinggi tingkat pengendalian internal, dan kompetensi aparatur sipil negara, maka semakin meningkat tingkat pencegahan kecurangan (*fraud*). Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian internal dapat berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*). Kompetensi Aparatur Sipil Negara juga dapat menurunkan tingkat kecurangan, semakin berkompeten seorang pegawai maka semakin tinggi tingkat pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan kata lain semakin tinggi kompetensi seorang pegawai dapat meningkatkan kecenderungan pencegahan kecurangan.

Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*)

Hasil pengujian pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) menunjukkan bahwa nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ ($\alpha = 5\%$). Hal ini berarti bahwa pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*).

Data penelitian menunjukkan tingkat penerapan pengendalian internal di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tebo sudah baik. Hal ini terbukti dari 70% responden memberikan pernyataan indikator pengendalian internal pada posisi “sering” dan “selalu” diimplementasikan pada Dinas

Pengendalian Internal, Kompetensi Auditor dan Pencegahan Fraud Pemerintah Daerah

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tebo. Pengendalian internal dapat berpengaruh dalam pencegahan kecurangan dimana hal ini juga didukung dengan hasil yang didapat dari SPSS yang menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh dalam mencegah kecurangan. Oleh karena itu semakin efektif pengendalian internal di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tebo, maka semakin tinggi pencegahan fraud, sehingga kemungkinan terjadinya terjadinya kecurangan semakin rendah.

Adanya pengendalian internal yang baik, maka kegiatan operasional juga dapat berjalan secara efektif dan efisien. Pengendalian internal merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu instansi, sangat berperan penting untuk mencegah dan mendekteksi kecurangan. Ke depan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tebo khususnya dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo umumnya harus semakin memperhatikan optimalisasi penerapan sistem pengendalian internal. Peran auditor internal sangat dibutuhkan di sini, bukan hanya peran sebagai *watchdog* tetapi juga peran sebagai konsultan dan katalisator. Selain dapat mencegah fraud, auditor internal juga akan dapat membantu untuk meningkatkan good governance di organisasi pemerintah tersebut (Rahayu, dkk, 2020).

Pengaruh Kompetensi Aparatur Sipil Negara Terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*)

Hasil pengujian pengaruh kompetensi aparatur sipil negara terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) menunjukkan bahwa Nilai signifikansi $0,048 < 0,05$ ($\alpha = 5\%$). Hal ini membuktikan bahwa kompetensi aparatur sipil negara berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*). Data penelitian kompetensi aparatur sipil negara pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tebo sudah baik, terbukti 6 orang aparatur yang telah menempuh pendidikan strata 2.

Hasil penelitian ini menarik karena pengaruhnya bersifat negative, artinya peningkatan kompetensi aparatur justru dapat menurunkan pencegahan kecurangan. Peningkatan kompetensi seorang aparatur negara justru berpotensi membuat aparatur semakin jadi lebih mampu mencari celah untuk pembenaran setiap kegiatan yang dilakukan. Walaupun sebenarnya, secara konsep kompetensi aparatur sipil negara yang baik diharapkan dalam melakukan kegiatan akuntansi dengan baik dan benar sehingga mengurangi adanya kecurangan akuntansi. Hal ini sejalan dengan peneliti sebelumnya yang dilakukan oleh I Gede Beni Wirakusuma dan Putu Ery Setiawan (2019), yaitu kompetensi aparatur sipil Negara berpengaruh negative terhadap kecenderungan kecurangan serta Hasil penelitian ini diperkuat dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Komang Adi Kurniawan Saputra, Putu Dian Pradnyanitasari, Ni Made Intan Piliandani dan I Gst. B. Ngr. P. Putra (2019), Kadek Widiyarta, Nyoman Trisna Herawati, dan Anantawikrama Tungga Atmadja (2017) Hersi Huslina, IslaHuddin, dan Nadir Syah (2015), yaitu Kompetensi aparatur sipil negara berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*), namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dwi Nur Hujanah (2019) dimana kompetensi aparatur tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan.

Pengendalian Internal, Kompetensi Auditor dan Pencegahan Fraud Pemerintah Daerah

SIMPULAN

Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji secara empiris pengaruh pengaruh Pengendalian Internal dan Kompetensi Aparatur Sipil Negara terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) studi empiris pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tebo. Berdasarkan hasil penelitian terhadap model penelitian dan pengujian hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengendalian Internal dan Kompetensi Aparatur Sipil Negara berpengaruh positif secara simultan terhadap Pencegahan Kecurangan (*fraud*). Adanya pengaruh secara signifikan antara variabel tersebut juga berarti bahwa dengan meningkatkan pengendalian internal dan kompetensi aparatur sipil negara dalam suatu instansi akan menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan instansi dalam pencegahan kecurangan (*fraud*).
2. Pengendalian Internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan pada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di kabupaten Tebo, disebabkan karena belum adanya peningkatan pengawasan pengendalian internal secara bertahap. Dengan adanya pengawasan pengendalian internal secara bertahap diharapkan dapat meningkatkan pencegahan kecurangan.
3. Kompetensi Aparatur Sipil Negara berpengaruh negatif terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada kantor dinas pendidikan dan kebudayaan dikabupaten tebo. Hal ini disebabkan oleh meningginya tingkat intelektual seorang pegawai tetapi tidak diselaraskan dengan pengendalian internal membuat seorang pegawai mencari kesempatan untuk melakukan sebuah kecurangan dengan mengandalkan pengetahuan mereka sehingga hal ini akan membuat penurunan dalam pencegahan kecurangan (*fraud*).

5.2 Saran

Bertolak dari simpulan penelitian maka peneliti mencoba memberikan masukan atau pertimbangan berupa saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi pegawai di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tebo, diharapkan dapat mampu meningkatkan kompetensi untuk semua pegawai yang ada di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tebo dengan cara: membuat peraturan dan menepatinya, biasakan bersikap jujur saat melakukan komunikasi, selalu menjaga diri dari lingkungan kita tetap bersih dan terorganisir, hal ini dapat dimulai dengan melatih diri kita dengan cara mengatur diri kita agar menyingkirkan hal-hal yang membuat kita tidak fokus. Serta selalu bergaul dengan orang yang berpikiran positif.
2. Bagi peneliti selanjutnya, agar melengkapi metoda survei dengan wawancara untuk meningkatkan keakuratan data serta menambah variabel independen lain yang terkait dengan pencegahan kecurangan (*fraud*), seperti moralitas individu, integritas Aparatur, dan Whistleblowing karena tingkat koefisien determinasi yang masih mungkin untuk ditingkatkan lagi.

Pengendalian Internal, Kompetensi Auditor dan Pencegahan Fraud Pemerintah Daerah

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan dan kelemahan. Beberapa keterbatasan ini diharapkan dapat diatasi pada penelitian berikutnya, keterbatasan-keterbatasan itu antara lain:

1. Penelitian ini keterbatasannya tidak disertai dengan wawancara yang tentunya akan menghasilkan data penelitian yang lebih baik.

Pada penelitian ini, masih banyak variabel-variabel lain yang diduga mempengaruhi pencegahan kecurangan pada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tebo, namun belum dimasukkan pada penelitian ini.

2. Agar melengkapi metoda survei dengan wawancara untuk meningkatkan keakuratan data serta menambah variabel independen lain yang terkait dengan pencegahan kecurangan (*fraud*), seperti moralitas individu, integritas Aparatur, dan Whistleblowing karena tingkat koefisien determinasi yang masih mungkin untuk ditingkatkan lagi.

Pengendalian Internal, Kompetensi Auditor dan Pencegahan Fraud Pemerintah Daerah

REFERENSI

- Andayani, Wuryan. 2008. Audit Internal. Edisi Kesatu. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jambi (BPK). 2019. Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah daerah kabupaten tebo 2018. [On line]. From: <https://jambi.bpk.go.id/lkpd-kabupaten-tebo-tahun-2018-wtp/> [agustus 10, 2019]
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). 2007. Peraturan No. 1 Tahun 2007 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan. [On line]. From: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5/peraturan-bpk-no-1-tahun-2007> [maret 10, 2019]
- Dharma, Surya. 2013. Manajemen Kinerja : Falsafah Teori dan Penerapannya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ghozali, Imam. 2014. Structural Equation Modeling Metode Alternatif Dengan Partial Least Squares (PLS). Edisi 4. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Ghozali. 2016. Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8). Cetakan ke 2. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Huljannah, Dwi Nur. 2019 Pengaruh Kompetensi Aparatur, Sistem Pengendalian Internal, Dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Keuangan Desa
- Huslina. Hersi, IslaHuddin.& Syah, Nadir. 2015. Pengaruh Integritas Aparatur, Kompetensi Aparatur, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Efektivitas Sistem Pencegahan Fraud.
- Indriantoro, Nur dan Supomo. 2014. Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi & Manajemen. Yogyakarta: BPFE.
- Indonesian Corruption Watch*. 2017. from: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/01/23/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-naik-2-poin-pada-2019> [agustus 15, 2019]
- Komisi Pemberantas Korupsi. 2019. Indeks Persepsi Korupsi 2019. Skor Indonesia di Angka 40. [Online] from: <https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/1462-indeks-persepsi-korupsiindonesia-membaik> [januari 18, 2021]
- Korompis. Sintia N, Saerang. David P. E; Morasa, Jenny. 2015. Pengaruh Moralitas Individu, Asimetri Informasi, dan Keefektifan Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*).
- Lestari, Baihaqi. 2014. Pengaruh keadilan organisasi dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kecurangan (fraud) pada SKPD Kabupaten Kaur. Tesis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu.
- Mulyadi. 2008. Sistem Akuntansi. Cetakan Keempat. Salemba Empat. Jakarta.
- Mulyadi. 2009. Akuntansi Biaya. Yogyakarta:STIE YPKPN.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2013. Pengertian Kecurangan
- Peraturan Bupati Tebo No 32. 2017. Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo.

Pengendalian Internal, Kompetensi Auditor dan Pencegahan Fraud Pemerintah Daerah

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. 2008. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Pusdiklatwas Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. 2008. *Kode Etik dan Standar Audit*. Edisi Kelima.
- Rohana, Thahier. 2012. Kompetensi Aparatur Pemerintah di Indonesia. Makassar: Tim Peneliti STIA LAN Makassar.
- Saputra, Komang Adi Kurniawan. Pradnyanitasari, Putu Dian. Prihandani Ni Made Intan. Putra, I Gst. B. Ngr. P. 2019. Praktek Akuntabilitas Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Untuk Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*; Vol. 10, No. 2 Januari 2019.
- Sedarmayanti. 2004. Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. Bandung: Mandar Maju
- Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sukadwilinda. Ratnawati R, Aryanti. 2013. Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Kecurangan. *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)*, 5 (1), 2013, 11-21.
- Suradi. 2006. Korupsi Dalam Sektor Pemerintah Swasta. Mengurai Pengertian Korupsi. Pendeteksian Pencegahannya dan Etika Bisnis. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Spencer, Lyle & Signe M. Spencer. 1993. *Competence at Work, Models For Superior Performance*. Canada : John Wiley & Sons, Inc.
- Tampubolon, Robert. 2005. *Risk and Systems-Based Internal Audit*. Cetakan pertama. Jakarta: PT Gramedia.
- Tunggal, Amin Widjaya. 2001. Memahami Konsep *Economic Value Added (EVA)* dan *Value Based Management (VBM)*. Harvarindo.
- Tunggal, Amin Wijaya. 2010. Dasar-Dasar Audit Intern Pedoman Untuk Auditor Baru. Harvarindo. Jakarta
- Tribun, Jambi. 2019. Bakal Ada Tersangka Baru Dalam Kasus Mark Up LPJU Tebo. [Online] from: <https://jambi.tribunnews.com/2019/07/23/bakal-ada-tersangka-baru-dalam-kasus-dugaan-mark-up-lpju-tebo> [oktober 29, 2019]
- Tribun, Jambi. 2018. Terdakwa Kasus Pembangunan Embung Sungai Abang Hadapi Tuntutan Minggu Ini. [Online] from: <https://www.google.com/search?q=Terdakwa+Kasus+Pembangunan+Embung+Sungai+Abang+Hadapi+Tuntutan+Minggu+Ini&oq=Terdakwa+Kasus+Pembangunan+Embung+Sungai+Abang+Hadapi+Tuntutan+Minggu+Ini> [oktober 29, 2019]
- Tribun, jambi. 2016. Terdakwa Korupsi Jalan Tebo Dituntut 7 Tahun. [Online] from: <https://jambi.tribunnews.com/2016/02/22/terdakwa-korupsi-jalan-tebo-dituntut-7-tahun> [oktober 29, 2019]
- Usman, Bhima Azis; Taufik, Taufeni; Rasuli. M. 2015. Pengaruh Tata Kelola Pemerintahan dan Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Kecurangan.

Pengendalian Internal, Kompetensi Auditor dan Pencegahan Fraud Pemerintah Daerah

- Wibowo. 2012. Manajemen Kinerja. Jakarta: raja Grafindo Persada.
- Wibowo. 2007. Manajemen Kinerja. Jakarta: PT. Raja Grafindo Parsada
- Widiyarta, Kadek; Herawati, Nyoman Trisna, & Atmadja, Anantawikrama Tungga. 2017. Pengaruh Kompetensi Aparatur, Budaya Organisasi, *Whistleblowing* dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan *Fraud*.
- Wilopo. 2006. Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi: Studi Pada Perusahaan Publik dan Badan Usaha Milik Negara Di Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi IX: Padang. 23-26 Agustus 2006.
- Wirakusuma, I, G, B; & Setiawan, P. E. 2019. Pengaruh pengendalian internal kompetensi dan *locus of control* pada kecenderungan kecurangan akuntansi, jurnal akuntansi trisakti, 3(1), 23.